



RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Stasiun KIPM Jambi



Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi ikut mewujudkan misi BPPMHKP yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hamadan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Jambi untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025 sebagai salahsatu dokumen perencanaan pembangunan sistem keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahunanggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakansesuai dengan peruntukannya.

Jambi, 4 Februari 2025
Kepala SKIPM Jambi



Piyana Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H
NIP. 19780824 200502 1 001



Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Grafik

1. Pendahuluan1

1.1. Tugas dan Peran Organisasi 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Sasaran 2

2.1. Rencana Strategis..... 3

2.2. Arah Kebijakan 5

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja..... 6

2.3.2. Indikator Kinerja 7

2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi.....10

3. PENUTUP 13



Daftar Grafik

Grafik 1.	Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per jenis Kegiatan.....	11
Grafik 2.	Alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per kegiatan dan per jenis belanja.....	13

1. Pendahuluan

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ditindaklanjuti dalam Kepmen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Renjana Kerja KKP. Peranan BPPMHKP menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis BPPMHKP diwujudkan dalam menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan BPPMHKP mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia.

BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen

pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangansistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran BPPMHKP Jambi tahun 2025 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan 2025 Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP tahun 2025-2029 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat serta menetapkan misi antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selain itu KKP mempunyai program Prioritas yang disebut dengan Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan, Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan antara lain:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan Pengendalian kawasan pesisir dan pulau pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global sertanasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi.

2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah: “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
3. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang Pengawasan dan Pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
 - b. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
 - a. Meningkatkan nilai PNBP BPPMHKP
3. Terselenggaranya system mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - a. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
 - b. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
 - c. Unit Kinerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
 - d. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengelolaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis Kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Staretegis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)
2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
 - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan , dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
 - c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
 - d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)
 - e. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)

- 
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
 - h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
 - i. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
 - j. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2025. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah dengan empat perspektif utama, antara lain:

1. Perspektif keuangan
2. Perpektis pelanggan
3. Perspektif proses bisnis
4. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan

Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Jambi tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Manajemen Mutu
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

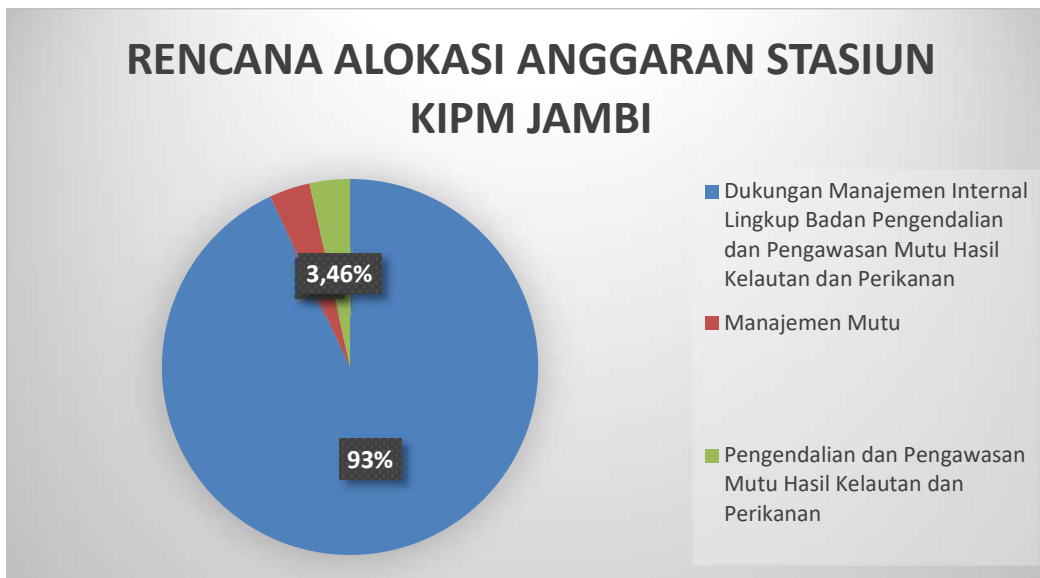
2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Jambi tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Jambi dalam

Mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4,766,439,000,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Jambi tahun 2025 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan merevisi kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per jenis KRO



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4,766,439,000,-Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.434.439.000,- (93,03 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 167.000.000,- (3,51 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 165.000.000,- (3,46 %)

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, terdiri dari :

1. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya sebesar Rp.5.000.000
2. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi sebesar Rp.45.000.000
3. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi Rp. 80.000.000
4. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya sebesar Rp. 25.000.000
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp.10.000.000
6. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp. 5.000.000
7. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp. 8.500.000
8. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan sebesar Rp. 80.000.000
9. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu sebesar Rp. 25.000.000
10. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium sebesar Rp.40.000.000

11. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi sebesar Rp. 8.500.000
12. Layanan Umum sebesar Rp. 103.880.000
13. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4.256.679.000
14. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 53.328.000
15. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 20.552.000

Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi per jenis belanja



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.766.439.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.586.646.000 atau sebesar 54,27 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.179.793.000 atau sebesar 45,73 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %

3. PENUTUP

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
7. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.766.439.000,-.. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.586.646.000 atau sebesar 54,27 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.179.793.000 atau sebesar 45,73 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%

Sedangkan rincian alokasi anggaran Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.434.439.000,- (93,03 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 167.000.000,- (3,51 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 165.000.000,- (3,46 %)

Demikian Rencana Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Tahun Anggaran 2025 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139
TELEPON (0741) 3061589
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski.jbi@gmail.com, skipm.jambi@kkp.go.id

Nomor : B.160/SKIPM.JMB/TU.140/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025
Stasiun KIPM, BPPMHKP Jambi

21 April 2025

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
di- Tempat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Jambi, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami diucapkan terimakasih.

Kepala Stasiun KIPM, BPPMHKP Jambi,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Piyan Gustaffiana



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I STASIUN KIPM JAMBI

2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Jambi Triwulan I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi SKIPM Jambi.

Jambi, 15 April 2025

Kepala,



Prian Gustaffiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	I
DAFTAR ISI -----	II
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	III
 BAB I PENDAHULUAN-----	 1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Profil Organisasi -----	2
1.3. Sistematika Penyajian -----	5
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA -----	 6
2.1. Visi dan Misi-----	6
2.2. Tujuan-----	7
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja -----	7
2.4. Pengukuran Kinerja -----	10
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA -----	 13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi -----	13
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja-----	22
3.3. Realisasi Anggaran -----	35
3.4. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -----	37
 BAB IV. P E N U T U P -----	 52
 LAMPIRAN-----	 52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi selama Triwulan I Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, SKIPM Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan I Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala SKIPM Jambi dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%,

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%,
 - c. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di lingkup UPT SKIPM Jambi, target 1 Lokasi
- 2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai) dari target 75.
 - b. Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai) dari target 75.
- 3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Jambi. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 92;
 - b. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT SKIPM Jambi, target 71,5;
 - c. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Jambi, target 100%;
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 87;
 - e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 86;
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Jambi, dari target 85%;
 - g. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Jambi, target 76%;
 - h. Persentase pemenuhan dokumen pemenuhan pembangunan zona integritas berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT SKIPM Jambi, target 70%;
 - i. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT SKIPM Jambi, realisasi (Nilai) 88,

Secara umum, SKIPM Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan I Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan SKIPM Jambi pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%, realisasi 100%;
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%, realisasi 100%;
2. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Jambi. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Jambi, dari target 85%, realisasi 100%;
 - b. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Jambi, target 76%, realisasi 100%;
 - c. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT SKIPM Jambi, realisasi (Nilai) 88%, realisasi 94,62%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Triwulan I Tahun 2025 dengan 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas SKIPM Jambi dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja SKIPM Jambi pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan

A blue circle with a white outline is positioned to the left of the text block.

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan SKIPM Jambi dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya.

SKIPM Jambi sebagai salah satu UPT BPPMHKP yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban menerapkan prinsip good governance dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja SKIPM Jambi yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk didalamnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. SKIPM Jambi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

A. Tugas dan Fungsi

SKIPM Jambi mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SKIPM Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi, SKIPM Jambi memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada

pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala SKIPM Jambi dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, serta Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

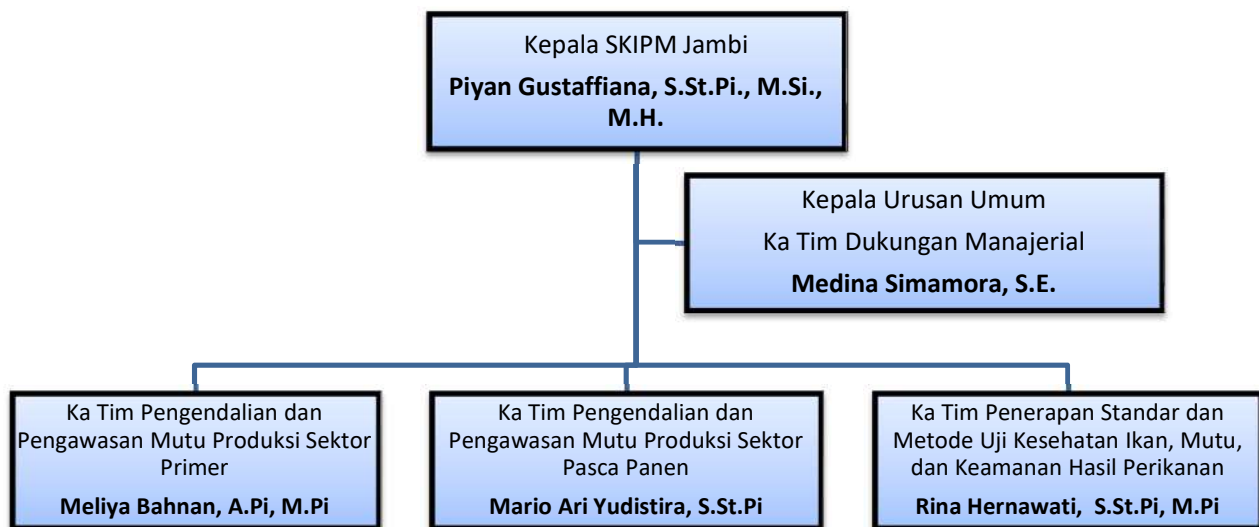
Pada tahun 2025, SKIPM Jambi memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional SDM Aparatur
5. Jabatan Fungsional Umum

Pada bulan Januari – Maret 2025 SKIPM Jambi memiliki pegawai berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, dengan jabatan yang ada di SKIPM Jambi terdiri dari: 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 6 (enam) orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, 1 (satu) orang fungsional analis APBN dan 1 (satu) orang Fungsional Pranata APBN, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur, serta 3 (tiga) orang fungsional umum.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Jambi memiliki 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/PPNPN yang terdiri dari 1 (satu) orang petugas keamanan (satpam), 9 (sembilan) orang pramubakti, 1 (satu) orang supir.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2025 SKIPM Jambi mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi SKIPM Jambi dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Jambi

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB II

Perencanaan Kerja

2.2. Tujuan

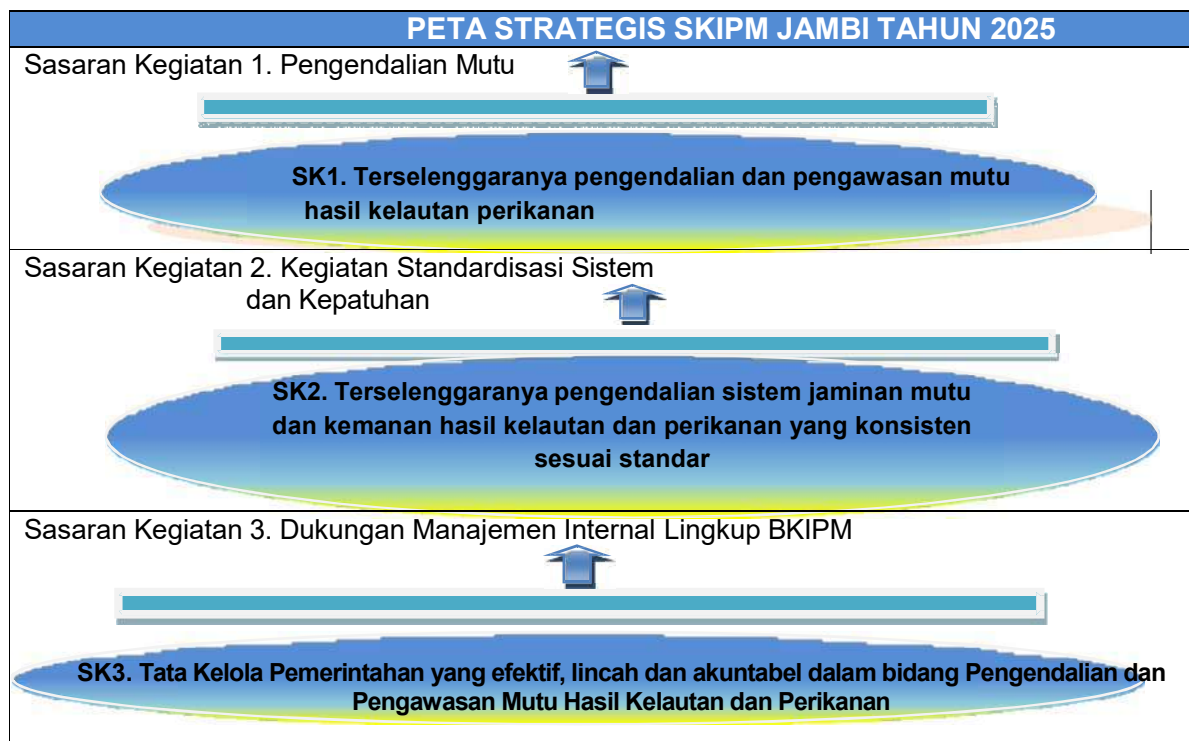
Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Jambi sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Jambi.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun berjalan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategis dan Sasaran Strategis SKIPM Jambi Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2. di bawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SKIPM Jambi Tahun 2025

Peta strategis SKIPM Jambi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kepala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai SKIPM Jambi. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai SKIPM Jambi dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	88

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indiktor Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	$50 - < 70$	$70 - < 90$	$90 - < 110$	$110 - 120$



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

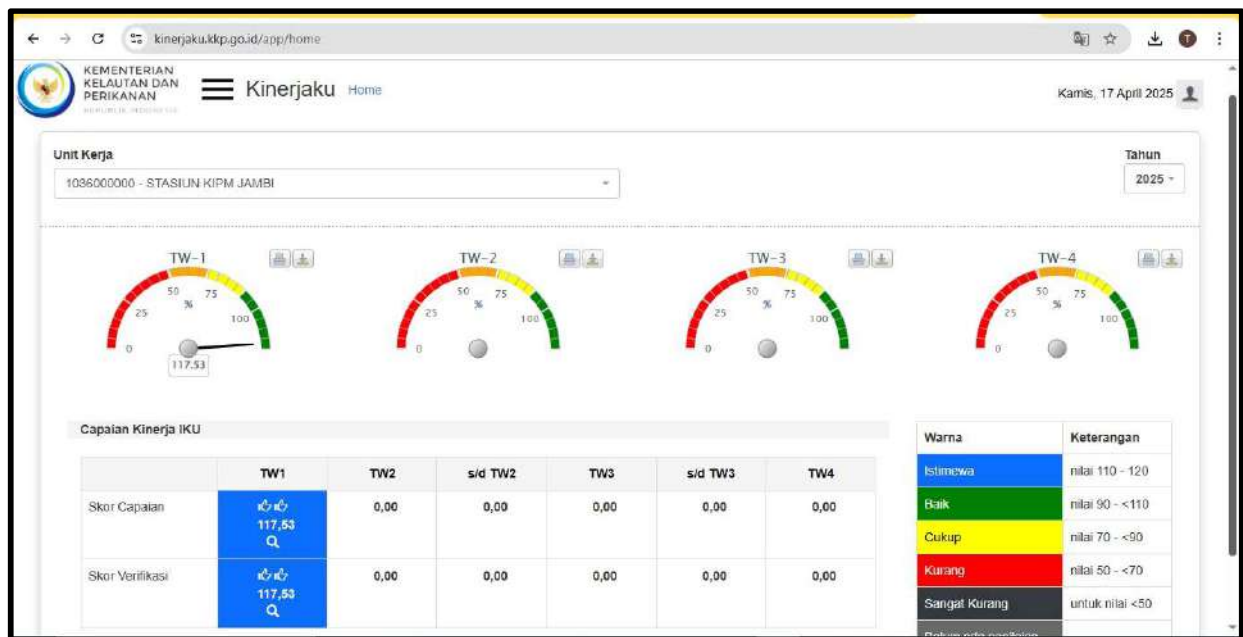
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

1.1.1. Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Capaian kinerja SKIPM Jambi pada Triwulan I Tahun 2025 termasuk dalam kategori istimewa yaitu dalam range nilai 110-120, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,56% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui laman www.kinerjaku.kkp.go.id., terlihat seperti pada gambar 3

Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis SKIPM Jambi Tahun 2025



Gambar 3. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) SKIPM Jambi Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 2. Capaian Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	142,85
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	142,85
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1	-	
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	-	
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	-	

SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92	-	
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5	-	
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100	-	
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	87	-	
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86	-	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85	100	117,64
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%)	76	100	131,57
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70	-	
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	88	94,62	107,52

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.2.1 SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 (Sembilan) indikator, yaitu Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal Perikanan (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Cara Sertifikasi Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

SK1 memuat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%) dan Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SKIPM Jambi (Lokasi).

A. IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%).

Sertifikasi sektor produksi primer perikanan adalah kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor Primer ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan/Instansi Pemerintah sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2025 SKIPM Jambi menerbitkan 3 Sertifikat sektor primer yaitu 2 Sertifikat CPIB (Instalasi Ikan Hias Telanaipura) dengan ruang lingkup benih ikan lele dan benih ikan gurame; dan 1 Sertifikat CBIB (PT. Kurnia Putra Primatama).

Analisis Keberhasilan Sektor Produksi Primer pada sertifikasi sektor primer telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SKIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 3.Target dan Realisasi IK1 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	70	100	142,85

B. IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%).

Sertifikasi sektor pasca panen merupakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Sertifikasi sektor Pasca panen ada dua, yaitu: Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP, yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Perikanan dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor pasca panen ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2025 SKIPM Jambi menerbitkan 10 Sertifikat sektor pasca panen yaitu 1 (satu) SKHS HACCP (UPI CV. Naina Sejahtera), Sertifikasi SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP sebanyak 9 (sembilan) sertifikat dari 9 permohonan pengajuan sertifikasi, nama UPI yang telah disertifikasi SKP adalah Aulia, Ny. Sing, Cempaka I, Surya, Lely, Teratai Putih, Isya, Icha dan Sumber Rejeki Laut.

Analisis Keberhasilan Sektor Pasca Panen telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SKIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	70	100	142,85

C. IK3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SKIPM Jambi (%)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BKIPM No. 45/PER-BKIPM/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat yang dijadikan sebagai pedoman UPT KIPM untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SKIPM Jambi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, dan Pasar Pasir Putih).

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar tradisional/semi modern dan sentra penyedia pangan sehat adalah untuk melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium SKIPM Jambi sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengawasan, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengawasan, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Analisis Keberhasilan Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan telah dilaksanakan pada tahap I di bulan Maret-April 2025 dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi	1	-	-	-

3.2.2 SK2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsiten sesuai standar.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020.

SK2 memuat 2 Indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi (%) dan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (%).

A. IK4 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi (%)

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. SKIPM Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor sertifikat LP-633-IDN (30 November 2020 - 18 Oktober 2025).

Pada Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi pada Triwulan 1 Tahun 2025 Capaian belum dapat direalisasikan karena disesuaikan dengan rencana aksi dan rencana kinerja yang

pelaksanaannya pada Triwulan IV (Target Tahunan).

Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi	75	-		-

B. IK5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (%)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKIPM Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor sertifikat LI-106-IDN (27 Oktober 2021 – 25 Juli 2026).

Pada Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi pada Triwulan 1 Tahun 2025 Capaian belum dapat direalisasikan karena disesuaikan dengan rencana aksi dan rencana kinerja yang pelaksanaannya pada Triwulan IV (Target Tahunan).

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi	75	-	-	-

3.2.3 SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Jambi

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator, yaitu Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM (Nilai), Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKIPM Jambi (%), Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi %, Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (indeks), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai), Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SKIPM Jambi (Nilai), dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai).

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

SKIPM Jambi telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Analisis Keberhasilan IKPA adalah Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Pada tahun Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah persemester.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi	92	-	-	-

B. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Pada tahun Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah semester.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi	71,5	-	-	-

C. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2023 dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2024}} \times 100\%$$

Gambar 3. Persentase Nilai Temuan LHP BPK

Penyelesaian temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SKIPM Jambi pada tahun 2025 adalah tuntas (100%) dari target 100%.

Analisis Keberhasilan Penyelesaian Temuan BPK adalah Selalu mengikuti peraturan menteri keuangan terbaru terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan agar tidak ada nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SKIPM Jambi.

Pada tahun Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Jambi	100	-	-	-

D. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Jambi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Analisis Keberhasilan IP ASN Pegawai SKIPM Jambi telah mengikuti diklat/pelatihan teknis dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahunan dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah semester

Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (%)	87	-	-	-

E. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi

Untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan untuk meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi kinerja. Penilaian ini diberikan atas hasil penilaian Itjen sesuai LKE permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi dan birokrasi instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dalam penilaian data dukung, kesesuaian target kinerja, realisasi kinerja, aplikasi kinerja dan ketercapaian kinerja.

Adapun aspek penilaian terhadap rekonsiliasi kinerja antara lain:

- Aspek Kepatuhan : Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek Kesesuaian : Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek Ketercapaian : Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Tabel 12. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Rating	Keterangan
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89	Baik
50 – 69	Cukup
0 – 49	Kurang

SKIPM selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja. Indikator Nilai rekonsiliasi kinerja Satker SKIPM Jambi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 14. Analisis Keberhasilan Indikator ini tercapai dengan telah disiapkannya seluruh dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian hasil rekonsiliasi kinerja antara lain Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

Pada Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK10 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi	86	-	-	-

F. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada tahun 2025 SKIPM Jambi memiliki target 85% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah SKIPM Jambi selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK11 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi	85	85	100	117,65

G. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Nilai Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi pada triwulan I tahun 2025 SKIPM Jambi memiliki target 76% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 131,58%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, SKIPM Jambi selalu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK12 Triwula I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi	76	76	100	131,58

H. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SKIPM jambi

Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) umumnya didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan dasar penilaian:

1. Komponen Pengungkit

Penilaian WBK berfokus pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas: Manajemen Perubahan: Mengukur sejauh mana perubahan pola pikir dan budaya kerja terimplementasi. Penataan Tata Laksana: Meningkatkan efisiensi proses kerja, termasuk penerapan teknologi informasi. Penataan Manajemen SDM: Efektivitas pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja organisasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Penguatan Pengawasan: Mekanisme untuk mencegah penyimpangan, seperti penerapan sistem pengendalian internal. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

2. Reform

Penilaian WBK berfokus pada pemenuhan aspek dokumen pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

3. Capaian Nilai Minimal

Penilaian Internal: Dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI untuk memastikan pemenuhan indikator secara internal. Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga

seperti Inspektorat atau Kementerian PANRB untuk memberikan penilaian objektif. Nilai minimal yang ditetapkan dalam bentuk skor yaitu 75/100 dan kriteria kualitatif tertentu.

4. Indikator Khusus

Komitmen Pimpinan: Bukti nyata komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung WBK. Keberlanjutan Program: Menilai kesinambungan program reformasi birokrasi. Perubahan Signifikan: Adanya dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

5. Pelibatan Stakeholder

Partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

6. Hasil Survei dan Feedback

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Mencerminkan kualitas layanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi. Contoh Langkah Evaluasi: Menyusun indikator kinerja dengan nilai minimal yang disyaratkan. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara terukur. Melakukan self-assessment dan audit oleh pihak internal. Memperoleh umpan balik dari pihak eksternal (misalnya, KemenPANRB, Ombudsman). Memastikan rekomendasi dari hasil evaluasi diterapkan secara konkret.

SKIPM selalu berupaya untuk meningkatkan Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada Triwulan I 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah semester.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK13 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi	70	-	-	-

I. Survey kepuasan masyarakat lingkup SKIPM Jambi (%)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantiina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) SKIPM Jambi melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik SKIPM Jambi secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan pada unit pelayanan SKIPM Jambi pada bulan Januari sd Maret 2025 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan. Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah responden 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari laki-laki 25 (dua puluh lima) orang, perempuan 6 (enam) orang dengan tingkat pendidikan SMA 20 (dua puluh) orang, dan S1 11 (sebelas) orang. Target IK14 pada Triwulan I tahun 2025 adalah 88 dan telah terealisasi sebesar 94,62% atau 107,52% dari target yang ditentukan.

Analisis Keberhasilan Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan SKIPM Jambi terhadap pengguna jasa. Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain: Mengadakan kegiatan coffe morning dan sosialisasi standar pelayanan pengguna jasa. Mengadakan forum konsultasi publik dan SKM triwulanan tahun 2025.

Capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK14 Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi	88	88	94,62	107,52

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Jambi tahun anggaran 2025 adalah Rp. 4.766.439.000,, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terdapat dua kali revisi anggaran yaitu revisi ke satu berupa revisi POK terkait dengan perubahan akun belanja sedangkan revisi kedua berupa revisi efisiensi anggran berdasarkan INPRES 01 Tahun 2025. Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2025

URAIAN	TW I Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	165.000.000	2.270.000	1,38
Manajemen Mutu	167.000.000	15.951.600	9,55
Dukungan Manajemen Internal	4.434.439.000	1.098.209.219	24,77
Total	4.766.439.000	1.116.430.819	23,42

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2025

URAIAN	TW I Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.586.646.000	741.013.115	28,65
Belanja Barang	2.179.793.000	375.417.704	17,22
Belanja Modal	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4.766.439.000	1.116.430.819	23,42
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	4.766.439.000	1.116.430.819	23,42

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2024	Naik (Turun) %
Dukungan Manajemen Internal	1.098.209.219	1.278.929.218	(16,45)
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	2.270.000	10.896.174	(380)
Manajemen Mutu	167.000.000	-	100
TOTAL	1.116.430.819	1.289.825.392	(15,53)

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran SKIPM Jambi yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada SKIPM Jambi meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. SKIPM Jambi juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran i

RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i

CAK_i = Capaian keluaran i

Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus, seperti petugas lapangan melakukan kegiatan pengawasan mutu domestik di suatu lokasi dan pada hari yang sama juga melaksanakan kegiatan inspeksi CPIB di lokasi yang searah sehingga terdapat efisiensi anggaran karena menggabungkan 2 (dua) kegiatan menjadi 1 (satu) kegiatan.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai SKIPM Jambi yang terbatas (15 orang pegawai ASN dan 11 orang Kontrak/PPNPN), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat rangkap tugas seperti Inspektur Mutu juga melakukan pengujian di laboratorium, Inspektur Mutu juga merangkap sebagai salah satu anggota Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian merangkap sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan dan lain sebagainya.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

Pengukuran capaian kinerja di SKIPM Jambi dilakukan terhadap 2 Sasaran Program, 3 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator SKIPM Jambi telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan seluruh indikator kinerja yang targetnya adalah triwulan, seluruh capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja baik triwulanan, semesteran, dan tahunan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Piyan Gustaffiana**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Jambi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAMBI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.434.439.000
2.	Manajemen Mutu	167.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	165.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025		4.766.439.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana



LAPORAN KINERJA

Triwulan II 2025

SKIPM JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Jambi Triwulan II Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi SKIPM Jambi.

Jambi, 15 Juli 2025

Kepala,



Piyan Gustaffiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	I
DAFTAR ISI -----	II
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	III
 BAB I PENDAHULUAN-----	 1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Profil Organisasi -----	2
1.3. Sistematika Penyajian -----	5
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA -----	 6
2.1. Visi dan Misi-----	6
2.2. Tujuan-----	7
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja -----	7
2.4. Pengukuran Kinerja -----	10
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA -----	 13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi -----	13
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja-----	22
3.3. Realisasi Anggaran -----	35
3.4. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -----	37
 BAB IV. P E N U T U P -----	 52
 LAMPIRAN-----	 52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi selama Triwulan II Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, SKIPM Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan II Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala SKIPM Jambi dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%,

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi (%), target 70;
 - c. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di lingkup UPT SKIPM Jambi, target 1 Lokasi.
- 2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai) target 75.
 - b. Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai) target 75.
- 3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Jambi. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 92;
 - b. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 71,5;
 - c. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SKIPM Jambi(%), target 100;
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 87;
 - e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 86;
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Jambi (%), target 85;
 - g. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Jambi (%), target 76;
 - h. Persentase pemenuhan dokumen pemenuhan pembangunan zona integritas berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT SKIPM Jambi (%), target 70;
 - i. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT SKIPM Jambi (Nilai), target 88.

Secara umum, SKIPM Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan II Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan SKIPM Jambi pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%, realisasi 100%;
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Jambi, target 70%, realisasi 100%;
2. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Jambi. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi, dari target 85%, realisasi 100%;
 - b. Indeks Profesionalisme ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks) dari target 75 realisasi
 - c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Jambi, dari target 85%, realisasi 100%;
 - d. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Jambi, target 76%, realisasi 100%;
 - e. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT SKIPM Jambi, dari target (Nilai) 88, realisasi (Nilai) 95,66.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Triwulan II Tahun 2025 dengan 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil.

A blue circle graphic is positioned to the left of the first paragraph.

Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas SKIPM Jambi dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja SKIPM Jambi pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan SKIPM Jambi dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya.

SKIPM Jambi sebagai salah satu UPT BPPMHKP yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban menerapkan prinsip good governance dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja SKIPM Jambi yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk didalamnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. SKIPM Jambi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

A. Tugas dan Fungsi

SKIPM Jambi mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SKIPM Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi, SKIPM Jambi memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala SKIPM Jambi dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, serta Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

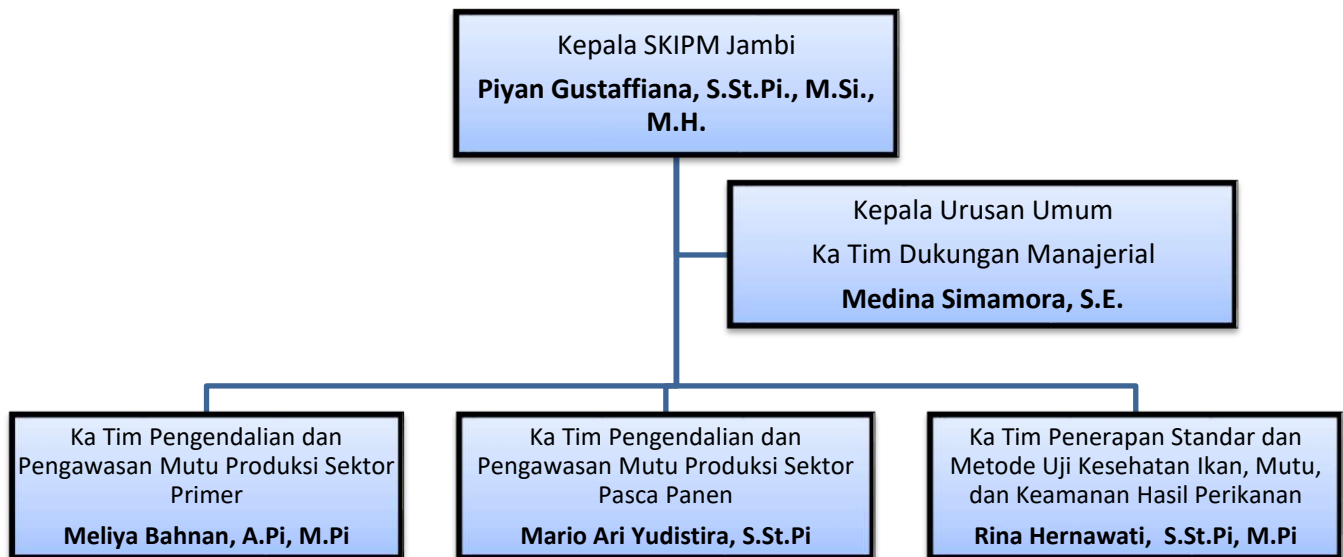
Pada tahun 2025, SKIPM Jambi memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional SDM Aparatur
5. Jabatan Fungsional Umum

Sampai dengan Juni 2025 SKIPM Jambi memiliki pegawai berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan jabatan yang ada di SKIPM Jambi terdiri dari: 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 6 (enam) orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, 2 (dua) orang fungsional analis APBN dan 1 (satu) orang Fungsional Pranata APBN, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur, serta 3 (tiga) orang fungsional umum.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Jambi memiliki 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/PPNPN yang terdiri dari 1 (satu) orang petugas keamanan (satpam), 9 (sembilan) orang pramubakti, 1 (satu) orang supir.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2025 SKIPM Jambi mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi SKIPM Jambi dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Jambi

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB II

Perencanaan Kerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Jambi sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Jambi.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun berjalan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategis dan Sasaran Strategis SKIPM Jambi Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2. di bawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SKIPM Jambi Tahun 2025

Peta strategis SKIPM Jambi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kepala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai SKIPM Jambi. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai SKIPM Jambi dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	88

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indiktor Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

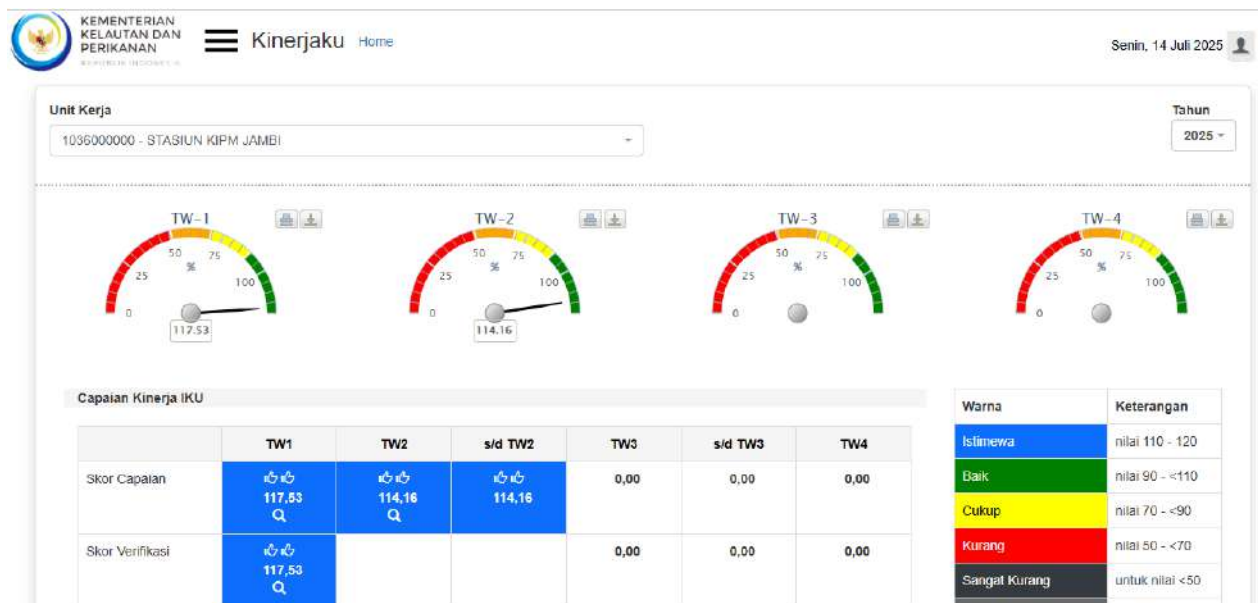
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

1.1.1. Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Capaian kinerja SKIPM Jambi pada Triwulan II Tahun 2025 termasuk dalam kategori istimewa yaitu dalam range nilai 110-120, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,56% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui laman www.kinerjaku.kkp.go.id, terlihat seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis SKIPM Jambi Triwulan II Tahun 2025



Gambar 3. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) SKIPM Jambi Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 2. Capaian Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1	1	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	-	-
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	-	-

SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92	99,88	117,51
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5	-	-
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100	-	-
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	87	75	83,33
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85	100	117,64
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%)	76	100	120
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70	-	-
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	88	95,66	108,70

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.2.1 SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 (Sembilan) indikator, yaitu Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal Perikanan (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Cara Sertifikasi Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

SK1 memuat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%) dan Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SKIPM Jambi (Lokasi).

A. IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%).

Sertifikasi sektor produksi primer perikanan adalah kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kemandirian hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor Primer ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan/Instansi Pemerintah sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan II Tahun 2025 SKIPM Jambi menerbitkan 1 (satu) Sertifikat sektor primer yaitu Sertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik) di Pakan Mandiri M.Ismail di Pinang Merah Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin Jambi .

Analisis Keberhasilan Sektor Produksi Primer pada sertifikasi sektor primer telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SKIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 3.Target dan Realisasi IK1 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan II	Triwulan II	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	70	100	120

B. IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Jambi (%).

Sertifikasi sektor pasca panen merupakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Sertifikasi sektor Pasca panen ada dua, yaitu: Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP, yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Perikanan dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor pasca panen ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan II Tahun 2025 SKIPM Jambi menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat sektor pasca panen yaitu 2 (dua) SKHS HACCP (UPI Hafish Food dan Koperasi LEPP Mitra Mandiri), Sertifikasi SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP sebanyak 1 (satu) sertifikat dari 1 permohonan pengajuan sertifikasi, nama UPI yang telah disertifikasi SKP adalah PT. Hasil Utama Sejati.

Analisis Keberhasilan Sektor Pasca Panen telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SKIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	70	100	120

C. IK3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SKIPM Jambi (%)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BKIPM No. 45/PER-BKIPM/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat yang dijadikan sebagai pedoman UPT KIPM untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SKIPM Jambi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, dan Pasar Pasir Putih).

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar tradisional/semi modern dan sentra penyedia pangan sehat adalah untuk melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium SKIPM Jambi sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengawasan, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengawasan, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Analisis Keberhasilan Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan telah dilaksanakan pada tahap I di bulan Maret-April 2025 dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 Triwulan II Semeseter I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi	1	1	1	100

3.2.2 SK2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsiten sesuai standar.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indicator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020.

SK2 memuat 2 Indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi (%) dan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (%).

A. IK4 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi (%)

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. SKIPM Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor sertifikat LP-633-IDN (30 November 2020 - 18 Oktober 2025).

Pada Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SKIPM Jambi pada Triwulan II Tahun 2025 capaian telah direalisasikan dengan nilai 89,64 % namun capaian realisasi akan dilaporkan di Triwulan IV (target tahunan).

Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi	75	-	89,64	119,52

B. IK5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (%)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKIPM Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor sertifikat LI-106-IDN (27 Oktober 2021 – 25 Juli 2026).

Pada Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi pada Triwulan II Tahun 2025 Capaian belum dapat direalisasikan karena disesuaikan dengan rencana aksi dan rencana kinerja yang pelaksanaannya pada Triwulan IV (Target Tahunan).

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan II	Triwulan II	
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi	75	-	-	-

3.2.3 SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SKIPM Jambi

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator, yaitu Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM (Nilai), Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKIPM Jambi (%), Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi %, Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (indeks), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai), Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%), Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SKIPM Jambi (Nilai), dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai).

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

SKIPM Jambi telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Analisis Keberhasilan IKPA adalah Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Pada Triwulan II 2025, Capaian IKPA SKIPM Jambi sebesar 99,88 % dan melebihi target dengan persentase capaian sebesar 117,51%.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Tw.II/Sms I	Tw.II/Sms I	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi	92	85	99,88	117,51

B. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Pada triwulan II 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Tw.II/Sms.I	Realisasi Tw.II/Sms.I	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi	71,5	-	-	-

C. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2025 dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2024}} \times 100\%$$

Gambar 3. Persentase Nilai Temuan LHP BPK

Penyelesaian temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SKIPM Jambi pada tahun 2025 adalah tuntas (100%) dari target 100%.

Analisis Keberhasilan Penyelesaian Temuan BPK adalah Selalu mengikuti peraturan menteri keuangan terbaru terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan agar tidak ada nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SKIPM Jambi.

Pada Triwulan II 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Tw. II/Sms.I	Tw. II/Sms I	
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Jambi	100	-	-	-

D. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Jambi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Analisis Keberhasilan IP ASN Pegawai SKIPM Jambi telah mengikuti diklat/pelatihan teknis dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target triwulan II dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada Triwulan II 2025, Satker SKIPM Jambi telah mencapai nilai IP ASN yaitu 83,33 % dan melebihi nilai target Triwulan II yaitu 75%.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan II	Triwulan II	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (%)	87	75	83,33	111,11

E. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi

Untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan untuk meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi kinerja. Penilaian ini diberikan atas hasil penilaian Itjen sesuai LKE permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi dan birokrasi instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dalam penilaian data dukung, kesesuaian target kinerja, realisasi kinerja, aplikasi kinerja dan ketercapaian kinerja.

Adapun aspek penilaian terhadap rekonsiliasi kinerja antara lain:

- Aspek Kepatuhan : Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek Kesesuaian : Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek Ketercapaian : Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Tabel 12. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Rating	Keterangan
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89	Baik
50 – 69	Cukup
0 – 49	Kurang

SKIPM selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja.

Pada Triwulan II 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK10 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi	86	-	-	-

F. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada tahun 2025 SKIPM Jambi memiliki target 85% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah SKIPM Jambi selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK11 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan II	Triwulan II	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi	85	85	100	117,65

G. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Nilai Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi pada triwulan II tahun 2025 SKIPM Jambi memiliki target 76% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 131,58%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, SKIPM Jambi selalu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK12 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi	76	76	100	120

H. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SKIPM jambi

Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) umumnya didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan dasar penilaian:

1. Komponen Pengungkit

Penilaian WBK berfokus pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas:

1. Manajemen Perubahan: mengukur sejauh mana perubahan pola pikir dan budaya kerja terimplementasi.
2. Penataan Tata Laksana: meningkatkan efisiensi proses kerja, termasuk penerapan teknologi informasi.
3. Penataan Manajemen SDM: efektivitas pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja organisasi.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: mekanisme untuk mencegah penyimpangan, seperti penerapan sistem pengendalian internal.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

2. Reform

Penilaian WBK berfokus pada pemenuhan aspek dokumen pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

3. Capaian Nilai Minimal

Penilaian Internal: Dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI untuk memastikan pemenuhan indikator secara internal. Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga seperti Inspektorat atau Kementerian PANRB untuk memberikan penilaian objektif. Nilai minimal yang ditetapkan dalam bentuk skor yaitu 75/100 dan kriteria kualitatif tertentu.

4. Indikator Khusus

Komitmen Pimpinan: Bukti nyata komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung WBK. Keberlanjutan Program: Menilai kesinambungan program reformasi birokrasi. Perubahan Signifikan: Adanya dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

5. Pelibatan Stakeholder

Partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

6. Hasil Survei dan Feedback

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): mencerminkan kualitas layanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi. Contoh Langkah Evaluasi: menyusun indikator kinerja dengan nilai minimal yang disyaratkan, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara terukur, melakukan self-assessment dan audit oleh pihak internal, memperoleh umpan balik dari pihak eksternal (misalnya, KemenPANRB, Ombudsman), serta memastikan rekomendasi dari hasil evaluasi diterapkan secara konkret.

SKIPM selalu berupaya untuk meningkatkan Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada Triwulan II 2025, Satker SKIPM Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK13 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi	70	-	-	-

I. Survey kepuasan masyarakat lingkup SKIPM Jambi (%)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) SKIPM Jambi melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik SKIPM Jambi secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan pada unit pelayanan SKIPM Jambi pada bulan April sd Juni 2025 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan. Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah responden 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari laki-laki 31 (tiga puluh satu) orang, perempuan 9 (sembilan) orang dengan tingkat pendidikan, SD 0 (Nihil), SMP, 0 (Nihil), SMA 25 (dua puluh lima) orang, D3 1 (satu) orang dan S1 15 (lima belas) orang. Target IK14 pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88 % dan telah terealisasi sebesar 95,66% atau 108,70 % dari target yang ditentukan.

Analisis Keberhasilan Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan SKIPM Jambi terhadap pengguna jasa. Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain: Mengadakan kegiatan coffee morning dan sosialisasi standar pelayanan pengguna jasa. Mengadakan forum konsultasi publik dan SKM triwulanan tahun 2025.

Capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK14 Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan II	Triwulan II	
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi	88	88	95,66	108,70

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Jambi tahun anggaran 2025 adalah Rp. 4.766.439.000, sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat 1 (satu) kali revisi anggaran yaitu revisi halaman III DIPA. Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan pada Triwulan II Semester 2025

URAIAN	TW II Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	165.000.000	2.270.000	1,38
Manajemen Mutu	167.000.000	39.420.600	23,61
Dukungan Manajemen Internal	4.434.439.000	1.939.143.491	43,73
Total	4.766.439.000	1.980.834.091	41,56

Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja pada Triwulan II Tahun 2025

URAIAN	Triwulan II Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.586.646.000	1.400.101.124	54,13
Belanja Barang	2.179.793.000	580.732.967	26,64
Belanja Modal	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4.766.439.000	1.980.834.091	41,56
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	4.766.439.000	1.980.834.091	41,56

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi Tw. II Tahun 2025	Realisasi Tw. II Tahun 2024	Naik (Turun) %
Dukungan Manajemen Internal	1.939.143.491	2.274.096.789	(17,27)
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	2.270.000	31.952.493	(1.3075)
Manajemen Mutu	39.420.600	-	-
TOTAL	1.980.834.091	2.306.049.282	(16,42)

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran SKIPM Jambi yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada SKIPM Jambi meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk

melakukan penghematan penggunaan anggaran. SKIPM Jambi juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CAK_i = Capaian keluaran i

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus, seperti petugas lapangan melakukan kegiatan pengawasan mutu domestik di suatu lokasi dan pada hari yang sama juga melaksanakan kegiatan inspeksi CPIB di lokasi yang searah sehingga terdapat efisiensi anggaran karena menggabungkan 2 (dua) kegiatan menjadi 1 (satu) kegiatan.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai SKIPM Jambi yang terbatas (16 orang pegawai ASN dan 11 orang Kontrak/PPNPN), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat rangkap tugas seperti Inspektur Mutu juga melakukan pengujian di laboratorium, Inspektur Mutu juga merangkap sebagai salah satu anggota Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian merangkap sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan dan lain sebagainya.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja di SKIPM Jambi dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Program, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator SKIPM Jambi telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada triwulan II / semester I tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan seluruh indikator kinerja yang targetnya adalah triwulan/semester, seluruh capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja baik triwulanan, semesteran, dan tahunan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Piyan Gustaffiana**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Jambi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAMBI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.434.439.000
2.	Manajemen Mutu	167.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	165.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025		4.766.439.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana